

BAB I

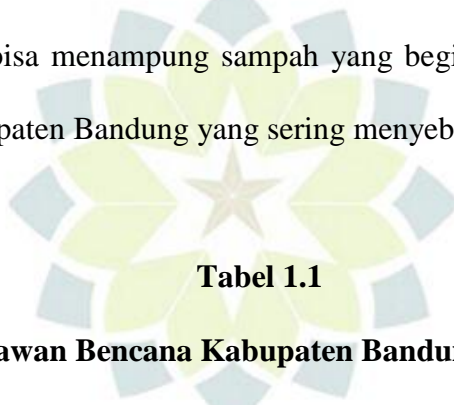
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sampah dapat di artikan sebagai sesuatu yang tidak di gunakan, tidak terpakai, tidak di senangi atau sesuatu yang di buang, yang berasal dari kegiatan dan tidak terjadi dengan sendirinya atau buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik (rumah tangga). Sementara didalam UU No.18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, disebutkan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik dapat terurai atau tidaknya yang bisa dianggap sudah tidak berguna lagi dan di buang kelingkungan.

Masalah sampah seperti sisi lain dari kehidupan, dimanapun itu, dipedesaan atau perkotaan sampah selalu hadir sebagai sebuah konsekuensi dari adanya aktivitas manusia. Setiap aktivitas barang atau sampah terlebih diperkotaan, padatnya penduduk serta meningkatnya tarif hidup masyarakat, secara tidak langsung berpengaruh pada peningkatan volume sampah. Permasalahan sampah tersebut semakin kompleks dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pengelolaan, karena kuantitasnya semakin meningkat, keterbatasan sumber dana bagi pelayanan umum, dampak dari pekerbangan ekonomi dan juga semakin tingginya aktivitas-aktivitas sumber potensial adanya sampah.

Selain itu sampah erat kaitannya dengan kesehatan masyarakat karena dari sampah tersebut dapat hidup berbagai organisme penyebab penyakit baik secara langsung maupun tidak langsung. Berbagai macam sampah pun sering menumpuk di aliran-aliran sungai. Bahkan selain menumpuknya sampah di aliran sungai terdapat banyak limbah yang di buang ke sungai biasanya itu di lakukan oleh pabrik-pabrik yang tidak bertanggungjawab. Dengan menumpuknya sampah di sekitaran sungai, sering menyebabkan banjir karena sungai sudah tidak bisa menampung sampah yang begitu banyaknya. Berikut Daerah-daerah Kabupaten Bandung yang sering menyebabkan banjir :



Tabel 1.1
Daerah Rawan Bencana Kabupaten Bandung Tahun 2007

No	Kecamatan	Rawan Banjir	Rawan Gerakan Tanah	Rawan Lintasan Lahar	Tanah Pondasi Buruk	Luas (ha)
1	Soreang	-	660,30	-	-	660,30
2	Kutawaringin	-	1.175,90	-	-	1.175,90
3	Katapang	-	-	-	-	-
4	Cwidey	-	3.602,55	356,95	-	3.959,50
5	Pasirjambu	-	4.009,41	1.387,37	-	5.396,78
6	Rancabali	-	584,06	1.131,07	-	1.715,13
7	Baleendah	1.514,37	494,27	-	-	2.008,64
8	Dayeuhkolot	272,38	-	-	-	272,38
9	Bojongsong	1.799,72	-	-	837,85	2.637,57
10	Banjaran	-	1.682,89	-	-	1.682,89
11	Pameungpeuk	36,27	2,02	-	-	38,29
12	Cangkuang	-	1.028,68	-	-	1.028,68
13	Arjasari	-	4.170,00	-	-	4.170,00
14	Cimaung	-	2.800,56	-	-	2.800,56
15	Pangalengan	-	213,09	-	-	213,09
16	Majalaya	-	159,33	-	-	159,33
17	Ciparay	797,28	1.633,21	-	-	2.430,49
18	Solokanjeruk	1.123,11	-	-	567,66	1.690,77
19	Pacet	-	1.830,38	-	-	1.830,38
20	Kertasari	-	-	1.607,32	-	1.607,32
21	Paseh	373,16	823,77	-	128,44	1.325,37
22	Ibun	-	203,53	-	-	203,53
23	Cileunyi	22,10	562,56	211,94	347,71	1.144,31
24	Rancaek	1.965,97	-	-	2.581,35	4.547,32
25	Cicalengka	-	1.559,08	-	440,05	1.999,13
26	Nagreg	-	1.313,95	-	-	1.313,95
27	Cikancung	71,05	574,58	-	631,34	1.276,97
28	Margahayu	-	-	-	-	-
29	Margaasih	-	-	-	-	-
30	Cilengkrang	-	1.297,62	252,14	-	1.549,76
31	Cimeryan	-	3.951,93	78,68	-	4.030,61
Jumlah (Ha)		7.975,41	34.333,67	5.025,47	5.534,40	52.868,95

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Dan Bidang Pengelolaan sampah,2007.

Daerah yang paling rawan yaitu Daerah Dayeuh Kolot dan Balaendah yang setiap tahun-nya sering menyebabkan banjir, karena di wilayah itu terdapat anak-anak sungai yang bermuara ke Citarum yang sering menumpuknya sampah hingga ke jalan raya.

Permasalahan timbunan sampah masyarakat di Kota Bandung saat ini diproyeksikan sebesar : 1.549 ton/ hari dengan jumlah penduduk pada tahun 2014 sebanyak 2.748.732 dan sampah yang terangkut ke tempat pemrosesan akhir sampah (TPA) sebesar + 1100 ton/hari, dengan komposisi sampah organik sebesar 57% dan anorganik sebesar 43% (Final report JICA tahun 2010). Untuk mengelola sampah Kota Bandung PD kebersihan melakukan berbagai inovasi antara lain dengan bank sampah, pengomposan, biodigester, biokonversi dengan maggot dan lain sebagainya agar sampah yang dibuang ke TPA berkurang.

Permasalahan lautan sampah pun menutupi aliran Sungai Cikapundung, di Kampung Cijagra Desa/Kecamatan Bojongsoang dan Sungai Citepus di Kampung Cisirung, Desa Cangkuang Wetan, Kecamatan Dayeuhkolot. Kepala BPLHD Jabar Anang Sudarna memperkirakan volume sampah di kedua anak Sungai Citarum tersebut tidak kurang dari 500 ton pada tahun 2016.

Sampah itu menumpuk sejak surutnya banjir di Bojongsoang dan Dayeuhkolot. Tumpukan sampah dari hulu Sungai Cikapundung itu, saat ini diperkirakan membentang sampai 150 meter dengan lebar sungai 12-15 meter. Ketebalan tak kurang dari 1 meter, prihatin dengan adanya tumpukan

sampah yang sampai mencapai ratusan ton. Padahal pemerintah saat ini, tengah berupaya membersihkan Sungai Ciatarum.(Sumber detik.com).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Pudjadi selaku Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan dapat di simpulkan bahwa banyak permasalahan sampah yang di hadapi pemerintah daerah Kab Bandung antara lain, volume sampah yang terus meningkat di sekitaran aliran sungai sehingga tidak tertampung di TPS-TPS.

Kemudian rendahnya dukungan dana operasional atau pemeliharaan sarana-prasarana persampahan di Kabupaten Bandung dan dana penyediaan sarana untuk mengangkut sampah, armada truk yang masih perlu tambahan dan ada beberapa kendaraan yang kurang layak di pakai menjadi permasalahan yang belum dapat di selesaikan. Secara khusus Kabupaten Bandung juga belum mempunyai Standar pelayanan minimum tentang pengelolaan persampahan. Hal ini menyulitkan pihak penanggung jawab pengelola sampah untuk dalam menjalankan tugasnya. Adapun jumlah Pengangkutan sampah Di Kabupaten Bandung sebagai berikut :

Tabel 1.2 Jumlah SDM Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkup**UPTD**

Unit Kerja	Status	Jumlah
UPT	PNS	47 orang
Pengangkutan	NON PNS	2 orang
Sampah Di Wilayah Soreang.	Pekerja Harian Lepas	71 orang
Jumlah		120 orang

Unit Kerja	Status	Jumlah
UPT	PNS	34 orang
Pengangkutan	NON PNS	1 orang
Sampah Di Wilayah Balaendah	Pekerja harian lepas	30 orang
Jumlah		53 orang

Unit Kerja	Status	Jumlah
UPT	PNS	28 orang
Pengangkutan	NON PNS	-
Sampah Di Wilayah	Pekerja harian lepas	53 orang

Rancaekek		
Jumlah	81 orang	

Unit Kerja	Status	Jumlah
UPT Pengangkutan Sampah Di Wilayah Ciparay	PNS	25 orang
	NON PNS	-
	Pekerja Harian Lepas	20 orang
Jumlah	45 orang	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, dan Bidang Pengelolaan Sampah Kab Bandung 2016.

Jumlah personil yang tertera dalam tabel tersebut belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh seksi angkutan sampah dikarenakan belum sesuai dengan beban kerja dari tugas seksi angkutan sampah yang lebih besar. Proses penambahan jumlah personil tidak semudah yang diharapkan, selain membutuhkan proses yang cukup lama pertimbangan-pertimbangan khusus seperti biaya penyajian juga menjadi faktor yang berpengaruh dalam penambahan jumlah pegawai. Hal ini dalam pengangkutan sampah memang belum efektif.

Begitu banyak sekali permasalahan tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung, hal ini membuat Pemerintah Kabupaten Bandung

membuat sebuah kebijakan yang mengatur tentang pengelolaan sampah. Kebijakan ini berupa peraturan daerah yaitu : Perda No 21 Tahun 2009 tentang pengelolaan sampah, yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. Adanya peraturan ini di harapkan mampu mengatasi banyaknya permasalahan sampah yang terjadi di Kabupaten Bandung khususnya di sekitaran sungai.

Usaha pemerintah seharusnya tidak cukup sampai disini, namun juga di sertai dengan tindakan yang konkrit untuk melaksanakan ketetapan dari sebuah kebijakan yang telah dibuat dalam tahap pelaksanaan kebijakan, pemerintah juga di tuntutan bekerja secara efektif. Di lakukan dengan efektif ketika apa yang di lakukan oleh pemerintah telah berhasil sesuai dengan tujuan visi-misi kebijakan yang telah di buat.

Berdasarkan uraian diatas mengenai permasalahan pengelolaan sampah yang terjadi di Kabupaten Bandung adanya upaya pemerintah Kabupaten Bandung untuk permasalahan tersebut melalui sebuah kebijakan (Peraturan daerah Kabupaten Bandung No 21 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah). Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah yang Bermuara ke Citarum “.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, peneliti menggunakan fokus dalam penelitian dan lebih mendalam dalam meneliti masalah. Adapun batasan masalah dalam peneliti ini yaitu hanya berfokus pada variabelnya dan yang berkaitan dengan variabel tersebut, yaitu implementasi kebijakan pengelolaan sampah dialiran sungai yang bermuara ke Citarum yang ada di Kabupaten Bandung. Berikut adalah klasifikasi fokus masalah yang diteliti :

1. Peraturan daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2009 tentang pengelolaan sampah diwilayah Kab Bandung.
2. Implementasi kebijakan pengelolaan sampah dialiran sungai Citarum Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2009 tentang pengelolaan sampah.
3. Faktor-faktor pendukung maupun penghambat yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan sampah dialiran sungai mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2009 tentang pengelolaan sampah.

C. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dimaksudkan untuk lebih menegaskan masalah-masalah yang akan teliti sehingga dapat ditentukan pemecahan masalah

yang tepat dan mencapai tujuan penelitian. Berdasarkan hal tersebut, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2009 tentang pengelolaan sampah di Kab Bandung?
2. Bagaimana Implementasi Kebijakan pengelolaan sampah dialiran sungai mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2009 tentang pengelolaan sampah di Kab Bandung?
3. Bagaimana faktor-faktor pendukung maupun penghambat yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan sampah dialiran sungai mengenai Peraturan daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2009 tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung?

D. Tujuan penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan agar penelitian tersebut dapat memberikan manfaat sesuai yang dikehendaki. Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2009 tentang pengelolaan sampah Di Kab Bandung.
2. Untuk mengetahui Implementasi kebijakan pengeloan sampah dialiran sungai mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2009 tentang pengelolaan sampah di Kab Bandung.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung atau penghambat yang mempengaruhi Implementasi kebijakan pengelolaan sampah dialiran

sungai mengenai peraturan daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 tahun 2009 tentang pengelolaan sampah di Kab Bandung.

E. Kegunaan penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya adalah :

1. Bagi peneliti

Peneliti ini bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman penulis terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah khususnya dalam bidang lingkungan hidup yaitu pengelolaan sampah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan dan menjadikan sampah sebagai sumber daya yang bermanfaat secara ekonomi.

2. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk memberikan gambaran sekaligus masukan bagi pihak pemerintah tentang pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kab Bandung.

3. Bagi Pengembangan Ilmu

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wacana kepustakaan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kab Bandung.

F. Kerangka Pemikiran

Implementasi kebijakan publik adalah sebagai tindakan-tindakan yang di lakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintahan maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Dalam penelitian ini untuk mempermudah melihat proses implementasi Perda Kabupaten Bandung N0 21 Tahun 2009 tentang pengelolaan sampah, peneliti menggunakan teori yang kemukakan oleh Edwards III (2008), yang mengemukakan ada 4 Faktor yang peneliti pergunakan untuk mengkaji implementasi kebijakan yaitu :

1. Komunikasi

Seperti di jelaskan dalam tinjauan pustaka, komunikasi kebijakan publik meliputi tiga hal penting yaitu transmisi, konsisten, dan kejelasan. Komunikasi dalam hal ini adalah komunikasi antara pembuat kebijakan peraturan-peraturan daerah Kabupaten Bandung No 21 tahun 2009 (Khususnya dalam pengelolaan sampah), yang di maksud pembuat kebijakan disini adalah DPRD dan Bupati Kab Bandung. Sedangkan pelaksana kebijakan sesuai dengan isi peraturan daerah tersebut adalah Dinas lingkungan hidup dan Bidang pengelolaan sampah yaitu pejabat instansi yang berwenang dalam pengelolaan persampahan (Kepala Dinas lingkungan hidup dan di Bidang pengelolaansampah dan perangkatnya).

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan oleh Edwards, komunikasi kebijakan yang efektif ditandai dengan Dinas lingkungan

hidup dan Bidang pe ngelolaan sampah harus memahami benar apa yang harus dilakukan dan dimengerti secara cermat, serta petunjuk pelaksana, pelaksanaan yang dipahami harus jelas.

Di samping itu kebijakan juga harus konsisiten. Secara jelas di sebut oleh Edwards (Winarno 2008:176): “Keputusan-keputusan yang bertentangan akan membingungkan dan menghalangi staf administrasi dan menghambat kemampuan mereka untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang efektif.” Demikian pula halnya,pesan yang terkandung dalam kebijakan, harus jelas bagi pelaksana kebijakan. “Ketidak jelasan komunikasi yang disampaikan berkenan dengan implementasi kebijakan akan mendorong terjadinya interprestasi yang salah bahkan mungkin bertentangan dengan makna pesan awal” (Edwards dalam winarno,2008 :1770.

2. Sumber-sumber

Faktor yang kedua yang di kemukakan oleh Edwards III adalah sumber-sumber yang juga merupakan faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan.Sumber ini meliputi aspek :Staf, informasi,wewenang,danfasilitas-fasilitas.

Dalam konteks pelaksanaan/implementasi kebijakan tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung, staf lebih terkait dengan jumlah kualifikasi personil pelaksana di Dinas lingkungan hidup dan bidang pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung, sedangkan informasi

lebih menekankan pada ketersediaan petunjuk pelaksanaan kebijakan dan data personil yang mengatasi atas petunjuk pelaksanaan dan menaatinya.

Wewenang lebih menunjuk pada indenpenden pelaksana kebijakan dari pengaruh pihak lain dalam melaksanakan kebijakan. Dalam hal pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung, aspek kewenangan dalam faktor sumber-sumber lebih melihat apakah dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, personil Dinas lingkungan hidup dan Bidang pengelolaan sampah benar-benar indenpenden atau memperoleh tekanan-tekanan/intervensi dari pihak lain, seperti legislatif, atasan, atau bahkan pihak pers, sehingga merasa takut untuk mengimplementasikan,kebijakan. Hal ini dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik.

Demikian pula halnya, fasilitas-fasilitas yang diperlukan dalam implementasi kebijakan, merupakan salah satu aspek yang juga mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan. Semakin lengkap fasilitas yang diperlukan, akan semakin efektif pelaksanaan/implementasi kebijakan tersebut.

3. Disposisi

Faktor ketiga adalah disposisi atau prilaku, yang lebih terkait dengan kuat tidaknya dukungan dari pelaksana. Semakin kuat dukungan pelaksana atas kebijakan yang telah diambil oleh pembuat kebijakan maka terbuka

kemungkinan besar pelaksana kebijakan melaksanakan kebijakan sebagaimana yang di inginkan oleh apara pembuat kebijakan.

Dalam konteks pelaksanaan kebijakan tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung, disposisi ini terkait dengan kuat tidaknya dukungan Dinas lingkungan hidup dan Bidang pengelolaan sampah terhadap kebijakan pengelolaan sampah tersebut. Dukungan itu sendiri, termasuk dukungan perangkat dinas terhadap pimpinan Dinas lingkungan hidup dan Bidang pengelolaan sampah Kabupaten Bandung. Semakin kuat dukungan perangkat Dinas lingkungan hidup dan Bidang pengelolaan terhadap kebijakan, semakin efektif pelaksanaan/implementasi kebijakan (Perda Kabupaten Bandung No 21 tahun 2009 tersebut.

4. Struktur Birokrasi

Faktor yang dikemukakan Edwards sebagai faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan/implementasi kebijakan adalah struktur organisasi. Dalam konteks pelaksanaan kebijakan (Peraturan daerah Kabupaten Bandung No 21 tahun 2009) tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung, struktur birokrasi lebih menyoroti aspek standar operasional prosedur (SOP) dan fragmentasi birokrasi.

Dapat dikemukakan bahwa semakin besar kebijakan pengelolaan sampah membutuhkan perubahan dalam cara yang lebih lazim dari Dinas lingkungan hidup dan Bidang pengelolaan sampah Kabupaten Bandung,

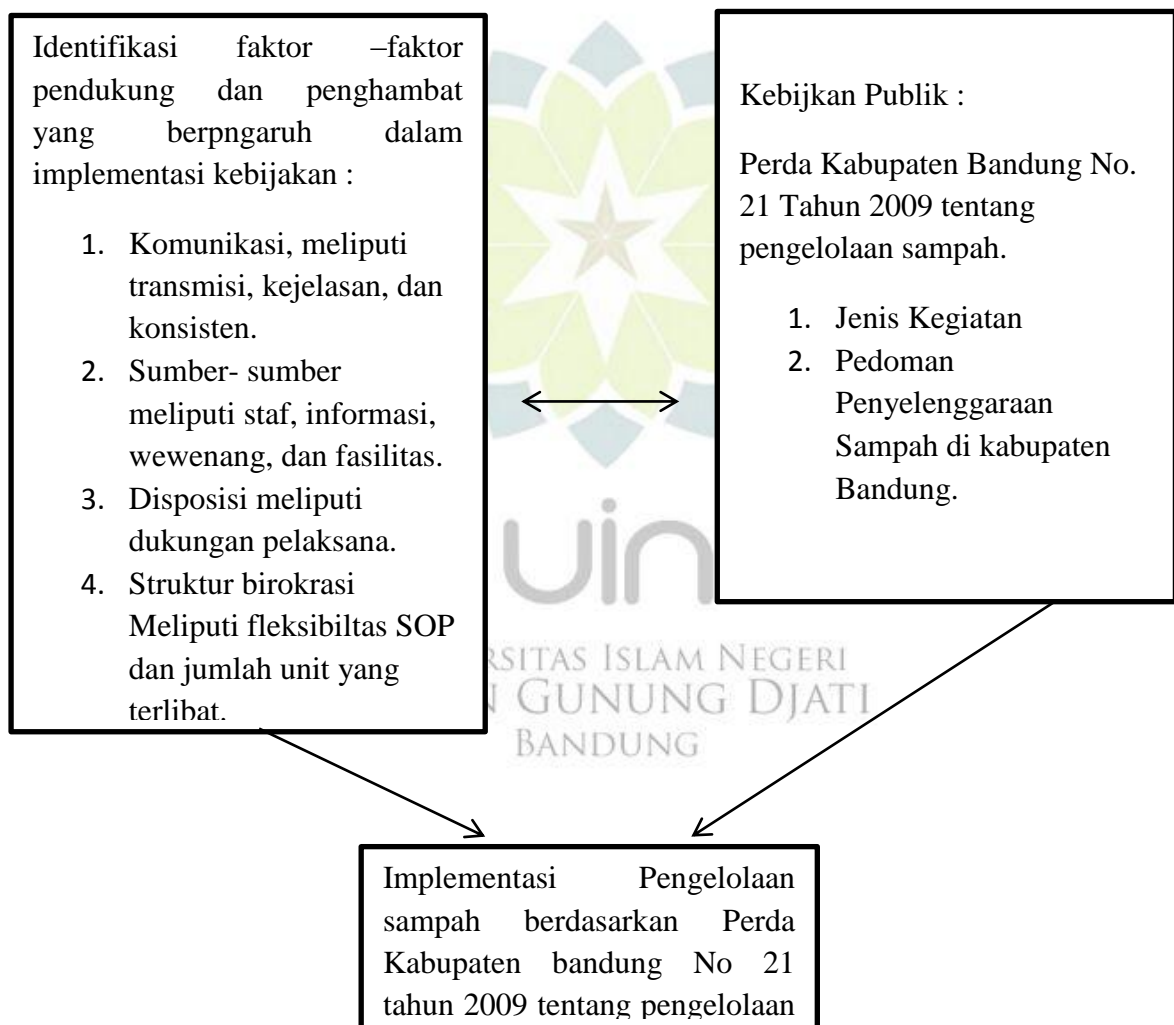
semakin besar pula kemungkinan SOP menghambat implemntasi kebijakan.

Fragmentasi terkait dengan jumlah unit yang terlibat dalam implemntasi kebijakan. Semakin banyak unit yang terlibat akan semakin sulit koordinasi yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat efektivitas pelaksanaan/implementasi kebijakan.



Bagan 1.2

Model Penelitian Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2009 tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung.



G. Proposisi

Proposisi adalah istilah yang digunakan untuk kalimat pernyataan yang memiliki arti penuh dan utuh. Hal ini berarti suatu kalimat harus dapat dipercaya, disangsikan, disangkal, atau dibuktikan benar tidaknya. Singkatnya, proposisi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang dapat dinilai benar atau salah.

Konsep : Kebijakan Publik

Variabel : Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Dialiran Sungai.

Proposisi : Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Dialiran Sungai yang bermuara ke Citarumdi Kab Bandung dengan melibatkan masyarakat sebagai sumber daya dalam pelaksanaan pengelolaan.

